



Dapatkah Pengelolaan Kolaboratif Menyelamatkan Taman Nasional Danau Sentarum?

Gusti Z. Anshari

Dapatkah Pengelolaan Kolaboratif Menyelamatkan Taman Nasional Danau Sentarum?

Gusti Z. Anshari

Penulis adalah Dosen Universitas Tanjungpura dan
Ketua Yayasan Konservasi Borneo

© 2006 oleh Center for International Forestry Research
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Diterbitkan tahun 2006
Dicetak oleh SMK Grafika Desa Putera, Indonesia

Foto sampul oleh Yurdi Yasmi

ISBN 979-24-4607-9

Diterbitkan oleh
Center for International Forestry Research
Alamat pos: P.O. Box 6596 JKPWB, Jakarta 10065, Indonesia
Alamat kantor: Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang,
Bogor Barat 16680, Indonesia
Tel. : +62 (251) 622622
Fax. : +62 (251) 622100
E-mail: cifor@cgiar.org
Situs: <http://www.cifor.cgiar.org>

Daftar Isi

Abstrak	iv
Ucapan terima kasih	v
1. Pendahuluan	1
2. Keunikan dan kondisi TNDS saat ini	2
2.1 Sosio-ekonomi	4
2.2 Sosio-budaya	4
2.3 Sosio-politik	5
3. Analisis pemangku kepentingan	6
4. Kerangka konsep pengelolaan kolaboratif TNDS	8
4.1 Upaya-upaya kolaboratif	10
4.2 Faktor pendukung dan penghambat proses kolaboratif	12
5. Kesimpulan	15
6. Daftar Pustaka	16

Abstrak

Makna taman nasional berbeda-beda, tergantung atas minat dan kepentingan masing-masing pemangku kepentingan (stakeholders). Sebagai pemegang otoritas pengelolaan taman nasional, Departemen Kehutanan menghadapi berbagai kesulitan dalam menangani perbedaan-perbedaan kepentingan ini.

Dalam tulisan ini, saya akan menyampaikan pengalaman dan analisis dalam mengembangkan pengelolaan kolaboratif Taman Nasional Danau Sentarum. Data berasal dari kegiatan-kegiatan lapangan dari tahun 2001 sampai 2005.

Pengelolaan kolaboratif terlihat sebagai salah satu solusi yang dapat memberikan hasil-hasil yang memuaskan bagi para pemangku kepentingan. Baik pada tingkat masyarakat maupun pemerintah, telah nampak ada perubahan-perubahan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mewujudkan pengelolaan kolaboratif Taman Nasional Danau Sentarum juga dibahas.

Kata kunci: taman nasional, pengelolaan kolaboratif, Danau Sentarum

Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Esther Blom, Henri Roggeri, Jeroen Stohl dari Small Wetlands Program, NC-IUCN di Belanda atas kepercayaannya pada Yayasan Konservasi Borneo untuk melakukan proyek konservasi di TNDS dari tahun 2001 sampai 2005. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Syariffudin, Husin, Sabran, Jefri, Sukarna, Pak Kacung, yang selama ini telah menjadi sahabat dan sumber inspirasi bagi penulis untuk tetap bergiat di dalam TNDS. Andi Erman, Ade Jumbuh dan Valentinus Heri juga pantas dianugerahkan ucapan terima kasih atas bantuannya. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, antaranya Puji Prahdjitno, Awen Supranata, Erwin Effendi, Niken Wuri Handayani, Ina Kartini, Alexander Rambonang, Ade Ja'far, dan Bupati Abang Tambul Husin. Proyek ini juga tidak mungkin terlaksana jika tanpa bantuan Diah Kusniawati, Fransiska Nelly, Sisilia Sossi, dan Zulkifli dari Yayasan Konservasi Borneo. Ucapan terima kasih yang tulus juga disampaikan kepada Moira Moeliono yang banyak memberikan kritik dan masukan untuk memperbaiki tulisan ini, dan Charlotte Soeria yang menangani urusan akomodasi dan logistik selama tinggal di CIFOR. Bantuan rekan-rekan lain, Linda Yuliani, Dede Wiliam, Heru Komarudin, dan Nugroho Adi Utomo dari CIFOR maupun relawan-relawan Andri Santoso dan Asma Sembiring dari RMI, dan Studio Kendil, serta Sambas Basuni, Cecep Kusmana, Saeri Sagiman, Sutarman, dan Dirhamsyah dari Fahutan IPB dan Untan sangat berharga sekali. Delia, Alam dan Adli, keluarga tercinta patut mendapatkan penghargaan atas pemberian kesempatan penulis untuk berjalan, melihat, dan belajar. Tulisan ini merupakan salah satu luaran (output) dari program "Building Leadership for Forest Reforms of the Future" yang diselenggarakan oleh CIFOR dan Ford Foundation Jakarta.

1. Pendahuluan

Menurut aturan yang berlaku taman nasional adalah kawasan pelestarian alam (UU No. 5/1990, Keppres No. 32/1990, PP No. 68/1998), yang memiliki ciri-ciri khas, dan berfungsi sebagai pelindung ekosistem yang menyangga sistem-sistem kehidupan. Taman nasional dikelola menurut zonasi yang ditujukan untuk rekreasi, pendidikan dan penelitian. Kenyataannya, keberadaan taman nasional sering kali menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat lokal dan pemerintah kabupaten. Umumnya arti, maksud dan tujuan penetapan taman nasional masih kurang dipahami. Maka tak heran kelestarian Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) terancam karena tingginya kegiatan manusia, seperti penangkapan ikan yang sangat intensif, penebangan liar, kebakaran lahan dan hutan, dan perubahan tata guna lahan.

Salah satu sebab adalah tidak jelasnya peranan pemerintah. Otoritas pengelolaan taman nasional berada pada Menteri Kehutanan (Lihat Peraturan Menteri Kehutanan No.P19/Menhut-II/2004). Akan tetapi pemerintah pusat belum berhasil membentuk mekanisme pengelolaan taman nasional yang efektif. Sebaliknya dalam era desentralisasi ini, pemerintah kabupaten mengharapkan pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusan pengelolaan taman nasional kepada pemerintah kabupaten untuk secara bersama-sama mengelola taman nasional, dengan pembagian wewenang, peran dan fungsi antara pemerintah pusat, dan kabupaten. Bagi masyarakat setempat di sekitar kawasan lindung, keberadaan taman nasional diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan sosial ekonomi.

Tulisan ini dibuat berdasarkan pengalaman dari kegiatan-kegiatan Yayasan Konservasi Borneo (YKB) dari tahun 2001 sampai 2005 di

kawasan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS). Kegiatan proyek bertujuan untuk mendukung pemerintah dan masyarakat dalam memelihara Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS). Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan upaya-upaya kolaborasi dengan beberapa pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, masyarakat dan LSM.

Data dikumpulkan melalui berbagai pendekatan, seperti diskusi terfokus, wawancara semi terstruktur, dan lokakarya. Responden terdiri atas 263 pria dan 97 wanita, yang berasal dari 17 kampung suku Melayu, dan 3 kampung suku Dayak, dan sebagian besar responden berasal dari komunitas suku Melayu. Dominasi responden yang lebih banyak berasal dari suku Melayu lantaran fokus kegiatan adalah pengelolaan sumberdaya perairan. Sangat disadari bahwa pelestarian dan kesehatan ekosistem akuatik akan sangat tergantung atas perlindungan kawasan dataran kering, yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air hujan. Kegiatan-kegiatan di daerah tangkapan air hujan ini sangat luas sehingga sulit dicakup seluruhnya. Sebaliknya, komunitas suku Melayu lebih mudah dihubungi karena bertempat tinggal di pinggir sungai atau danau. Karena itu, responden-responden dalam penelitian ini lebih banyak berasal dari komunitas suku Melayu. Penyebaran tingkat pendidikan responden ditampilkan pada gambar 3a dan 3b.

Dalam tulisan ini diajukan gagasan bahwa pendekatan kolaboratif berpotensi untuk menyelamatkan TNDS. Pengelolaan kolaboratif diharapkan dapat menciptakan tata kelola mandiri (*self governance*) yang akan menciptakan keuntungan bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

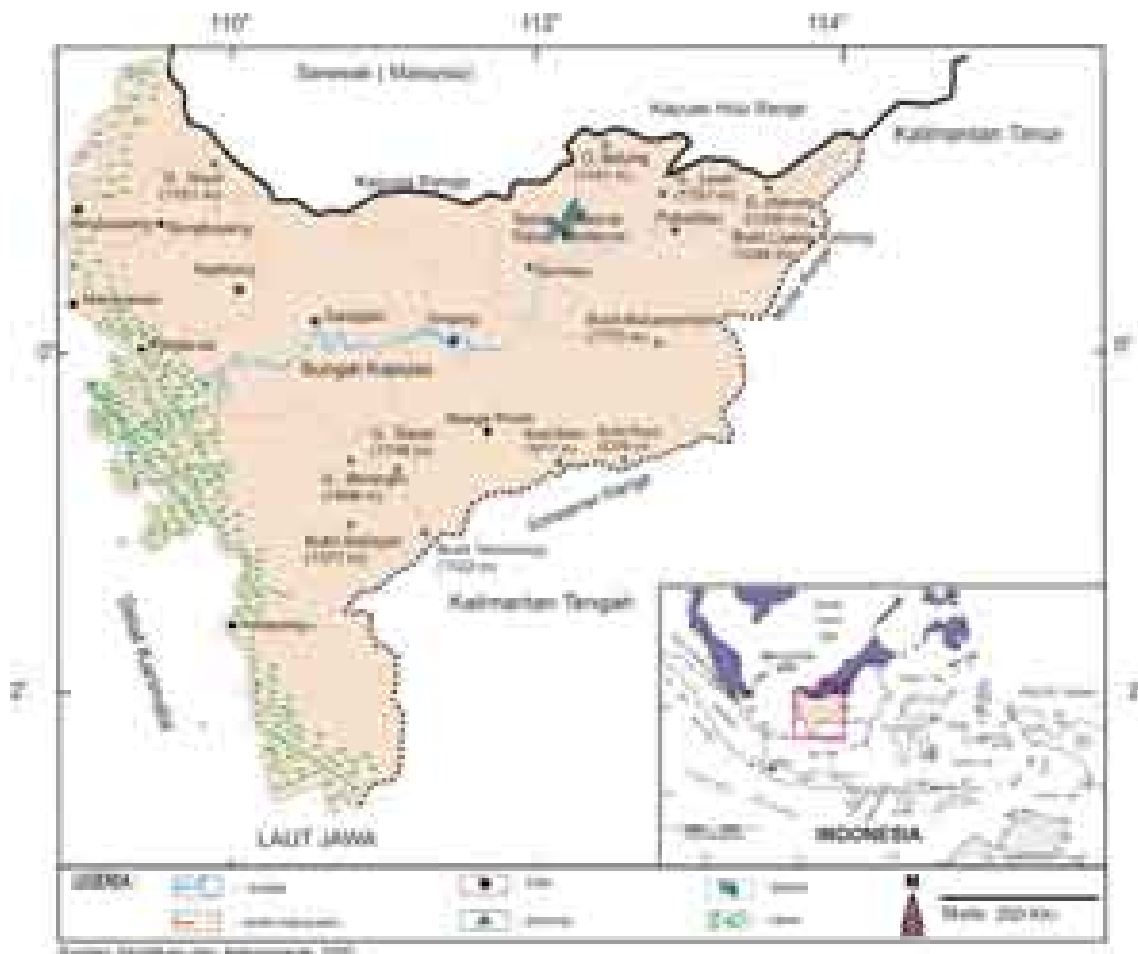
2. Keunikan dan kondisi TNDS saat ini

Taman nasional dapat dipandang sebagai tatanan sistem-sistem kompleks yang saling berinteraksi dan saling-tergantungan, sehingga membentuk satu kesatuan yang terwujud dalam sub-sistem ekologi, sosio-ekonomi, sosio-budaya, dan sosio-politik. Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) terletak di Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat (Lihat Gambar 1).

TNDS ($\pm 132\ 000$ ha) terdiri atas sekumpulan danau musiman (23%), dan beberapa formasi

hutan rawa ($\pm 49\%$) yang unik dan kaya akan keanekaragaman hayati (Giesen and Aglionby 2000). Selain itu, di dalam kawasan terdapat juga beberapa bukit, yang merupakan habitat dari hutan meranti dan kerangas.

Sejak tahun 1994, kawasan ini telah dinyatakan sebagai situs Ramsar, sebagai bukti pengakuan masyarakat internasional sebagai lahan basah yang penting bagi pelestarian keanekaragaman hayati.



Gambar 1. TNDS terletak di bagian hulu Sungai Kapuas dan termasuk dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan

Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan TNDS selalu beriklim basah dan lembab (ever-wet climate) sehingga sangat mendukung perkembangan keanekaragaman hayati. Kondisi selalu basah tersebut ditunjukkan dengan terjadinya pembentukan gambut pada zaman es terakhir (Anshari et al, 2004). Pada waktu itu, diperkirakan bahwa kondisi iklim di paparan Sunda lebih kering dengan curah hujan kurang dari 50% dibandingkan curah hujan sekarang (Verstappen 1975, 1980, 1994).

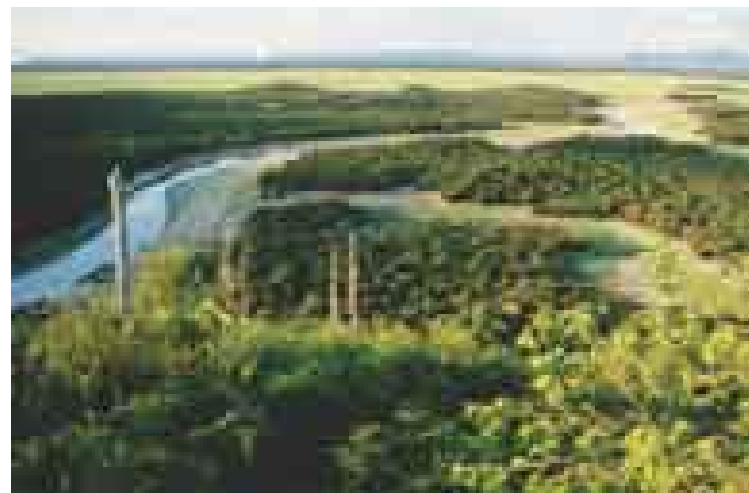
Beberapa spesies endemik dijumpai dalam TNDS. Misalnya jenis-jenis tumbuhan seperti *Caesaria* spp, *Croton cf ensifolius*, *Dichlanthe borneensis*, *Eugenia ambigua*, *Helicia cf petiolaris*, *Korthlsella cf germinans*, *Microcos cf stylocarpus*, *Rhodoleia* spp, *Ternstroemia cf toguian*, dan *Vatica cf umbronata* (Giesen 1987, 1996).

TNDS juga tempat hidup bagi berbagai jenis yang langka dan dilindungi. Tiga jenis buaya, yaitu buaya sinyulong (*Tomistoma schlegelii*), buaya muara (*Crocodylus porosus*), dan satu lagi jenis yang belum diidentifikasi, yang mirip dengan buaya siam (*C.siamensis*). Ketiga jenis buaya ini tercantum dalam CITES Lampiran 1. Perairan TNDS adalah tempat hidup ikan arwana (*Scleropages formosus*) jenis super merah (super red dragon fish) yang harganya sangat mahal, dan termasuk dalam daftar CITES Lampiran 1. Pada habitat hutan rawa, sudah langka dijumpai orang utan (*Pongo pygmaeus*), tetapi kelompok-kelompok bekantan (*Nasalis lavartus*) acap kali terlihat di sekitar pinggir danau dan sungai. Ramin (*Gonystylus bancanus*) merupakan jenis yang paling sering ditebang dari hutan rawa gambut dalam TNDS. Burung ruwai (*Argusianus argus*) dan karau paruh merah (*Ciconia stormi*) juga termasuk jenis-jenis langka yang statusnya dilindungi. Masih banyak lagi jenis-jenis lain yang terancam punah. Laporan yang cukup komprehensif tentang TNDS dapat dilihat dalam monograf Borneo Research Bulletin No. 31 tahun 2000.

Secara berkala, danau-danau di dalam TNDS mengalami kekeringan total seperti pada tahun 1994, 1997, 2003, dan 2004. Giesen (1987) memperkirakan kekeringan danau-danau ini berkaitan dengan pengurangan curah hujan bulanan di bagian hulu DAS Sungai Kapuas. Jika curah hujan bulanan kurang dari 250 mm, dan berlangsung periode kering selama 3 bulan berturut-turut, muka air danau mulai surut secara perlahan-lahan. Periode kering ini mulai terjadi pada bulan April, dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus. Muka air danau akan kembali naik pada bulan September, dengan pasang tertinggi terjadi pada bulan Desember, Januari dan Februari. Perubahan muka air danau ini merupakan keunikan TNDS, dan



Gambar 2a. Fase basah (Foto: G Anshari, Jan. 2004)



Gambar 2b. Fase kering (Foto: R. Dennis, 1994)

sangat penting pengaruhnya bagi spesiasi yang kemungkinan meningkatkan keanekaragaman hayati dalam TNDS. Pola hidrologi yang teratur juga mempengaruhi pola dan teknik-teknik penangkapan ikan. Pola pasang surut telah berlangsung ribuan tahun, dan membawa proses adaptasi yang luar biasa bagi flora dan fauna, terutama ikan-ikan air tawar, yang melakukan pemijahan di dalam kawasan TNDS. Perubahan siklus hidrologi akibat perubahan iklim global dan tindakan-tindakan pembangunan infrastruktur, seperti bendung, yang mungkin dipikirkan untuk dibangun dalam TNDS, akan menghancurkan sumberdaya perikanan dan keseluruhan ekosistem yang unik ini.

2.1 Sosio-ekonomi

Sumberdaya alam TNDS telah dimanfaatkan oleh masyarakat sejak ratusan tahun (Molengraaff 1900). Ada dua suku, yaitu Melayu dan Dayak Iban, yang berdiam di dalam TNDS. Kedua suku tersebut merupakan penduduk asli karena sebagian besar suku Melayu keturunan dari suku Dayak.

Total jumlah penduduk yang tinggal dalam kawasan ini diperkirakan pada saat ini antara 10 sampai dengan 11 ribu jiwa¹, yang tersebar dalam 40 kampung. Perkembangan penduduk tinggi sekitar 40% dari tahun 1985-1995 (Aglionby, 1997) sedangkan pada musim kemarau, waktu panen ikan, terjadi peningkatan 20% jumlah nelayan yang memasuki TNDS (Colfer *et al*, 2000).

Kondisi pendidikan penduduk di TNDS relatif rendah. Hampir 50% penduduk di TNDS hanya berpendidikan sekolah dasar. Jumlah wanita yang buta huruf lebih banyak dari pria. Sebagian besar wanita hanya berpendidikan sampai SMP (Lihat Gambar 3 dan 4).

Berdasarkan mata pencaharian, suku Melayu umumnya bekerja sebagai nelayan. Lebih dari 80% pendapatan tunai masyarakat Melayu diperoleh dari sumberdaya ikan (Aglionby 1995). Berbeda dengan suku Melayu, masyarakat Dayak sebagian besar berladang, memungut hasil hutan, dan bekerja di Malaysia untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Setelah reformasi (1997-1998), penebangan kayu menjadi salah satu sumber pendapatan tunai, baik bagi suku Melayu dan Iban. Sejak tahun 2000 hampir seluruh kampung di dalam TNDS terlibat penebangan kayu sehingga kerusakan lingkungan cukup terasa.

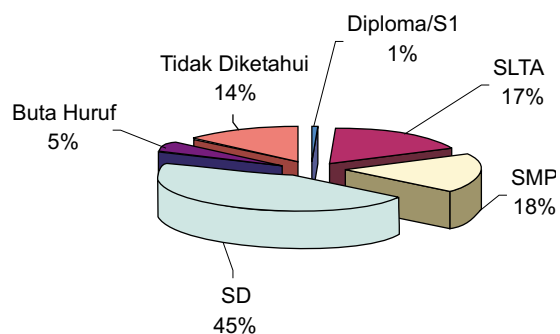
2.2 Sosio-budaya

Umumnya masyarakat suku Melayu berasal dari kota-kota yang berada di sepanjang Sungai Kapuas, seperti Suhaid, Selimbau, dan Jongkong. Pada awalnya, mereka masuk kawasan TNDS untuk menangkap ikan, dan tidak berdiam secara permanen. Akan tetapi kini sudah banyak pemukiman permanen lengkap dengan rumah ibadah, puskesmas dan sekolah.

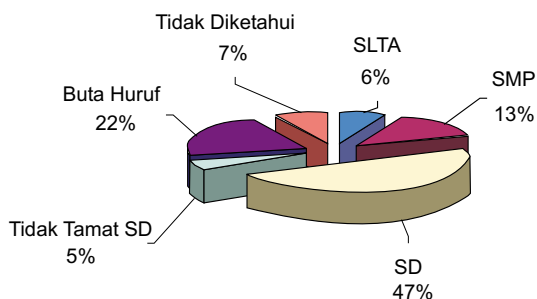
Di setiap kampung terdapat rukun nelayan, yaitu institusi yang mengatur pemanfaatan sumberdaya perikanan. Bentuk organisasi rukun nelayan ini sederhana, umumnya terdiri atas ketua, wakil ketua dan sekretaris. Setiap tahun setiap rukun nelayan mengadakan musyawarah untuk menetapkan alokasi sumberdaya ikan, penggunaan alat-alat tangkap, dan waktu penangkapan ikan.

Baik suku Melayu maupun Dayak mengelola sumberdaya di TNDS sebagai sumber daya bersama (*common pool resources*), walaupun hak-hak individu tetap diakui. Hak-hak untuk

memanfaatkan sumberdaya alam, diberikan kepada anggota-anggota masyarakat adat melalui musyawarah. Pada dasarnya akses untuk memanfaatkan sumberdaya alam terbuka bagi setiap individu selama ada permintaan izin atau tercapai kesepakatan sebelum dilakukan eksploitasi. Mekanisme adat yang mengatur penggunaan sumberdaya alam di TNDS bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan. Akibat dari perubahan zaman dan adanya pengaruh-pengaruh dari luar, sering kali aturan-aturan adat ini dilanggar. Ada kesulitan dalam menjatuhkan sanksi adat karena aturan-aturan adat tersebut belum diakui secara resmi oleh pemerintah. Tanpa pengakuan pemerintah, aturan-aturan adat secara perlahan mengalami degradasi, dan menyebabkan melemahnya kemampuan masyarakat adat sebagai institusi untuk mengantisipasi perubahan-perubahan dan tawaran untuk mendapatkan kenikmatan materialitis dalam waktu cepat. Indikasi melemahnya institusi adat adalah keengganan sebagian masyarakat untuk menjadi pengurus rukun nelayan karena lebih tertarik untuk menjadi pengurus desa, yang diakui keberadaannya dan dibayarkan honorarium oleh pemerintah.



Gambar 3a. Tingkat Pendidikan Responden Pria (n=263)



Gambar 3b. Tingkat Pendidikan Responden Wanita (n=97)

¹ Kepadatan penduduk di dalam kawasan TNDS diperkirakan sekitar 8-9 jiwa per Km².

2.3 Sosio-politik

Secara operasional, sebagian pengelolaan kawasan konservasi (\pm 730827 ha) di Propinsi Kalimantan Barat diserahkan kepada Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA, Lihat SK Menteri Kehutanan No. 6187/Kpts-II/2002), kecuali Taman Nasional Betung Kerihun, Bukit Baka Bukit Raya, dan Gunung Palung. Tugas pokok BKSDA adalah melaksanakan pengelolaan kawasan suaka margasatwa, cagar alam, taman wisata alam dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan diluar kawasan Taman Nasional. Lembaga ini dipimpin oleh kepala balai (eselon 3), dan membawahi tiga seksi wilayah konservasi yang berkedudukan di Ketapang, Sintang, dan Singkawang.

Taman Nasional Danau Sentarum berada di bawah Seksi Konservasi Wilayah II yang berkedudukan di Sintang (Lihat Gambar 1)². Secara operasional, TNDS dikelola oleh Resor Semitau yang dipimpin oleh 1 kepala resor, 2 teknisi, dan 1 polisi hutan di pos jaga Lanjak.

Pemegang otoritas TNDS ini selain jauh dari lokasi, juga jarang melakukan kegiatan-kegiatan

sehingga keberadaannya tidak dirasakan, baik oleh masyarakat, maupun pemerintah kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu ruang lingkup sangat luas karena mencakup seluruh DAS Kapuas sedangkan Sungai Kapuas adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari TNDS. Karena itu, pengelolaan TNDS tidak dapat hanya ditangani oleh BKSDA atau Balai Taman Nasional yang akan dibentuk oleh Departemen Kehutanan, tetapi dibutuhkan keterlibatan pemangku-pemangku kepentingan lainnya. Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan P.19/2004, pengelolaan taman nasional pada masa yang akan datang akan mengarah pada pendekatan kolaboratif. Sementara itu, komitmen dari pemerintah kabupaten, propinsi, dan pusat untuk melakukan kegiatan konservasi masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari kecilnya anggaran yang dialokasikan untuk konservasi. Lemahnya institusi adat berdampak langsung terhadap tingkat pengelolaan sumberdaya perairan, yang kemungkinan mempercepat proses-proses tanpa aturan atau open access.

². Pada bulan Mei 2006, Departemen Kehutanan telah mencanangkan pembentukan UPT Taman Nasional Danau Sentarum.

3. Analisis pemangku kepentingan

Dalam tulisan ini, pemangku kepentingan diartikan sebagai individu, kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga pemerintah yang memiliki minat dan/atau wewenang untuk mengambil peran dalam pengelolaan sumberdaya alam (Ingles et al, 1999). Analisis pemangku kepentingan tidak berdasarkan pendekatan otoritas, atau kekuasaan legal yang dianugerahkan oleh negara, tetapi menggunakan pendekatan menurut fungsi-fungsi dan realitas lapangan. Pendekatan ini menguntungkan pemangku kepentingan yang lemah menurut kekuasaan politik atau otoritas, tetapi melakoni peran dan fungsi penting dalam pemanfaatan sumberdaya alam (*local resource users*). Pemangku-pemangku kepentingan TNDS tersusun atas kelompok pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat (terutama suku Melayu dan Dayak Iban), organisasi nir-laba, pihak swasta, dan lembaga-lembaga internasional. Masyarakat luas, baik nasional dan internasional, memiliki berbagai tingkat kepedulian atas TNDS (Lihat Tabel 1). Para pemangku kepentingan ini memiliki minat yang berbeda-beda, dan berbagai masalah dan hambatan dalam menjalankan perannya.

Pada dasarnya, masyarakat, pemerintah

kabupaten, maupun pemerintah pusat belum memiliki pengalaman dan keahlian yang memadai untuk menyelamatkan taman nasional dari proses-proses kehancuran. Para pemangku kepentingan lainnya juga belum kompeten.

Permasalahan yang dihadapi sangat kompleks. Sampai saat ini, sumberdaya TNDS secara intensif dieksploitasi, terutama akibat dari tingginya permintaan pasar atas hasil-hasil kayu dan ikan. Dengan pertambahan jumlah penduduk, tingkat eksploitasi semakin meningkat, sehingga membahayakan keberadaan TNDS sebagai ekosistem penyangga kehidupan dan penyedia langsung mata pencaharian bagi masyarakat lokal. Pada tingkat manajemen, pemerintah pusat dan daerah (kabupaten dan provinsi) cenderung memperdebatkan status, dan wewenang pengelolaan secara hukum daripada merumuskan program kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk pembangunan ekonomi maupun kapasitas masyarakat untuk melestarikan TNDS. Perbedaan kepentingan ini mungkin dapat dijumpai melalui pendekatan kolaboratif.

Tabel 1. Kelompok-kelompok pemangku kepentingan dalam pengelolaan TNDS menurut kepentingan, fungsi dan peran

No	Pemangku Kepentingan	Sub-kelompok	Kepentingan Utama	Fungsi dan Peran	Masalah Utama
1	Masyarakat	Masyarakat Melayu Masyarakat Dayak Iban	Terutama pemanfaatan sumberdaya perairan, dan hutan rawa Terutama pemanfaatan sumberdaya lahan dan hutan	Pemelihara kawasan inti Pemelihara kawasan penyangga	<ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya institusi lokal - Peningkatan jumlah penduduk - Degradasi sumberdaya alam yang mengancam sumber mata pencaharian
2	Pemerintah	Departemen Kehutanan dan BKSDA Kalimantan Barat Departemen Kelautan dan Perikanan Kalbar Kabupaten Kapuas Hulu Dinas pariwisata Kalbar	Pemegang otoritas TNDS Pengembangan perikanan Sumber PAD Obyek pariwisata	Patroli dan pelayanan Peningkatan produksi ikan Pembangunan ekonomi dan pelayanan masyarakat Pengembangan wisata	<ul style="list-style-type: none"> - Belum berpengalaman dengan mekanisme kolaborasi - Lebih berorientasi proyek daripada pembangunan program - Rendahnya kepercayaan masyarakat - Buruknya birokrasi dalam hal pelayanan dan penyebaran informasi - Kompetisi untuk mendapatkan proyek
3	Organisasi nirlaba	Lembaga Swadaya Masyarakat Universitas dan lembaga penelitian	Pembangunan masyarakat (community development) Penelitian dan publikasi	Fasilitator/ mediator Peningkatan kesadaran publik Peningkatan kapasitas Pengembangan ilmu dan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> - Belum jelas pembagian minat berdasarkan keahlian - Belum mandiri dan cenderung tergantung atas bantuan negara atau lembaga donor - Belum ada program yang terpadu - Rendahnya kualitas SDM dalam bidang pemberdayaan, dan penelitian - Kompetisi untuk mendapatkan bantuan dari lembaga donor
4	Pihak swasta	Pedagang dan pengusaha ikan Pengusaha/cukong kayu Pengusaha jasa pariwisata	Peningkatan pendapatan	Pembukaan lapangan kerja Penyalur/ distribusi barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas pada perdagangan komoditas ikan dan hasil hutan yang dipungut dari alam - Belum ada kegiatan investasi - Buruknya prasarana
5	Lembaga internasional	Lembaga bantuan pembangunan pemerintah negara sahabat LSM internasional	Peningkatan pendapatan daerah Pembangunan masyarakat Penelitian dan Publikasi	Penyandang dana Sumber informasi Penyediaan tenaga ahli Peningkatan perhatian masyarakat internasional	<ul style="list-style-type: none"> - Minat lembaga yang berbeda-beda dan masih lemahnya koordinasi dan kerjasama antara lembaga - Kompetisi untuk mendapatkan bantuan dari lembaga donor
6	Masyarakat luas	Masyarakat Kalimantan Barat Masyarakat nasional Masyarakat internasional	Sumber air baku Perlindungan keanekaragaman hayati	Penikmat jasa-jasa lingkungan Kelompok penekan (Pressure Group)	<ul style="list-style-type: none"> - Enggan mengeluarkan dana kompensasi

4. Kerangka konsep pengelolaan kolaboratif TNDS

Pengelolaan kolaboratif diartikan sebagai kesepakatan dua atau lebih pemangku kepentingan untuk membagi informasi, peran, fungsi dan tanggung jawab dalam suatu hubungan dan mekanisme kemitraan (*partnership*) yang disetujui secara bersama (Borrini-Feyerabend et al, 2000). Ciri khas kolaborasi adalah proses-proses saling belajar (*sharing*), terutama berbagi informasi. Dalam proses mencapai tujuan seringkali dilakukan penyesuaian terus menerus atau adaptif (Carlsson and Berkes 2005).

Dalam proses pembentukan kolaborasi sangat penting diciptakan mekanisme partisipasi (Lihat Tabel 2). Seringkali partisipasi diartikan dengan sempit dan dirancukan dengan kegiatan sosialisasi program atau proyek. Hal ini sering terjadi jika pemilik agenda datang kepada para pemangku kepentingan, dan memberitahukan rencana-rencana kegiatan proyek, dan sama sekali tidak melibatkan para pemangku kepentingan lain. Seluruh proses-proses mulai dari penyusunan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi hasil-hasil proyek dikelola sendiri. Partisipasi hanya akan berjalan jika ada hak seluruh pemangku kepentingan untuk mengakses dan mendapatkan informasi, rencana penyusunan kebijakan publik, dan rencana-rencana kegiatan pembangunan lainnya, menyatakan pendapat serta menyampaikan usulan-usulan agar kegiatan proyek, kebijakan publik dan rencana pembangunan dapat memberikan manfaat dan keuntungan untuk seluruh pemangku kepentingan.

Kegiatan sosialisasi rencana proyek atau kebijakan pemerintah dapat dipandang sebagai awal untuk meningkatkan partisipasi jika masukan-masukan dari para pemangku kepentingan diperhatikan dan digunakan untuk merevisi rencana proyek. Partisipasi tidak akan terjadi jika para pemangku kepentingan bersifat pasif dan tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, walaupun mungkin diberikan tugas-tugas dan insentif sebagai imbalan dari pelaksanaan proyek. Proses partisipasi selalu menyediakan kesempatan bagi para pemangku

kepentingan untuk menyampaikan pendapat atas suatu rencana kegiatan, baik melalui proses konsultasi, dengar pendapat, ataupun melalui mekanisme lain. Pada kenyataannya, pendekatan ini masih belum dapat dilakukan dengan baik karena keterbatasan waktu dan kewajiban administrasi yang mengharuskan proyek cepat-cepat diselesaikan. Selain itu, masyarakat dan pemerintah lebih berminat untuk mendapatkan hasil-hasil proyek secara fisik dan dalam waktu yang singkat.

Pembentukan pengelolaan kolaboratif dapat dimulai dari proses-proses kooperasi, kemitraan, dan akhirnya kolaborasi. Untuk mencapai kesetaraan dalam kolaborasi diperlukan waktu yang sangat panjang, dan jika telah tercapai kolaborasi, maka diharapkan tercapai tata kelola mandiri (*self governance*). Artinya, tugas pemeliharaan TNDS tidak lagi berdasarkan adanya inisiatif proyek tetapi dilakukan atas dasar kesadaran dan kemandirian. Pada tahapan ini peranan pemerintah sebagai otoritas tunggal kawasan taman nasional diharapkan berkurang, karena kekuasaan dipegang para pemangku kepentingan yang secara bersama-sama selalu belajar untuk melakukan pengelolaan yang lebih baik. Mengelola kolaboratif dicirikan oleh pembagian wewenang secara adil, akuntabilitas, dan transparan.

Pengelolaan taman nasional secara kolaboratif tidak lagi bertumpu pada satu pemangku kepentingan tetapi menyebar dalam kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang telah dapat mengatur dirinya sendiri menurut wewenang, peran dan fungsi serta tanggung jawabnya masing-masing. Secara ideal, para pemangku kepentingan secara sadar menjalankan wewenangnya, peran dan fungsi, serta bertanggung jawab secara publik atas kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Proses-proses belajar dalam pengelolaan kolaboratif akan membantu para pemangku kepentingan untuk menciptakan rencana-rencana kegiatan yang adaptif.

Tabel 2. Tingkatan (kadar) partisipasi menuju terwujudnya pengelolaan kolaboratif

No	Pendekatan	Tingkatan (kadar) partisipasi
1	Non-partisipasi	Pemilik proyek atau agenda bertindak sebagai inisiator, yang menentukan agenda, dan mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi kegiatan-kegiatan proyek. Pada tingkatan ini, pemilik proyek dapat melibatkan pihak lain untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan proyek dengan imbalan. Pihak lain tersebut kemungkinan bertindak sebagai konsultan atau kontraktor.
2	Ko-operasi	Pemilik agenda atau proyek mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan, dan kemudian menganalisis masukan-masukan tersebut. Setelah itu pemilik proyek atau agenda tersebut menyusun rencana, melaksanakan kegiatan, dan mengevaluasi hasil-hasil kegiatan proyek.
3	Kemitraan	Pemilik atau pengusul proyek atau agenda bersama pemangku kepentingan lain yang telah bersepakat membentuk kemitraan dan bersama-sama menentukan agenda kegiatan. Dalam hal ini pemilik yang pertama kali mengusulkan proyek atau agenda memimpin pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab atas hasil-hasil kegiatan.
4	Kolaborasi	Proyek atau agenda diusulkan dan dirancang bersama. Para pemangku kepentingan setara dan bersama-sama mengidentifikasi permasalahan, merumuskan kegiatan, dan mengevaluasi hasil-hasil kegiatan. Proses belajar dilakukan bersama-sama secara terus menerus, dan rencana-rencana kegiatan disusun secara adaptif dan lentur (fleksibel). Pada tahapan ini, diperlukan fasilitator untuk mempercepat proses-proses kolaborasi. Peranan fasilitator sebagai pengamat proses-proses, penasehat dan tidak menentukan arah ataupun melakukan intervensi.

Sumber: Modifikasi dari Cornwall (1995)

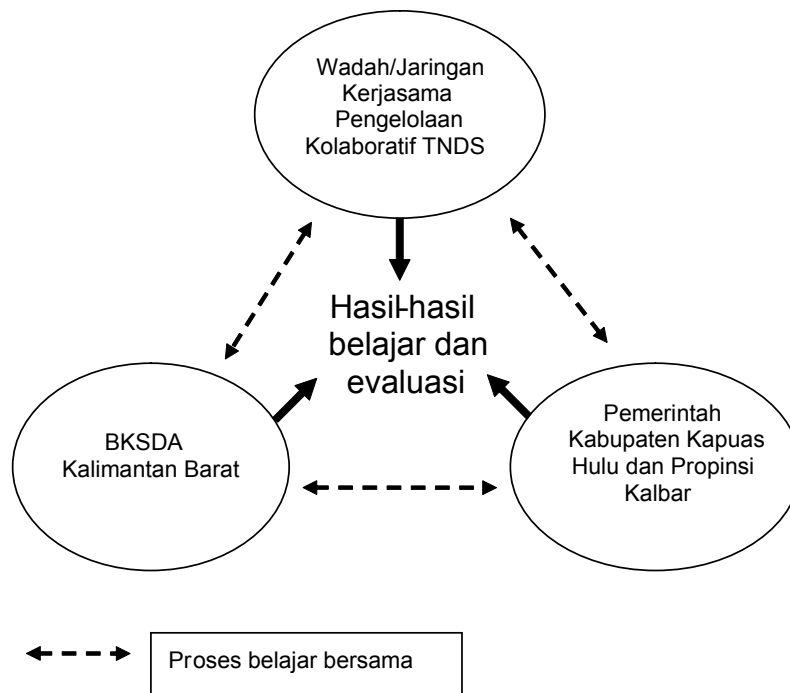
Partisipasi adalah kunci sukses mencapai kolaborasi. Sebagai pemangku kepentingan yang secara langsung memanfaatkan sumberdaya TNDS, peranan masyarakat lokal dapat menjadi perusak atau pemelihara TNDS (Giesen, 1987). Untuk memperkuat peranan dan fungsi masyarakat lokal sebagai pengelola TNDS, pemerintah diharapkan dapat mengakui hak-hak adat. Penegakan aturan-aturan adat oleh masyarakat dan untuk masyarakat kemungkinan dapat menyelamatkan TNDS karena akan ada kepastian akses, hak-hak, dan insentif untuk mengembangkan tata kelola TNDS. Pada saat sekarang, masyarakat lokal secara institusi masih lemah, dan perlu mendapatkan bantuan dalam hal bimbingan teknis dari para ahli, bantuan manajemen, dan advokasi.

Secara konseptual, proses pembentukan pengelolaan kolaboratif ditunjukkan pada Gambar 3. Mekanisme ini merupakan hasil lokakarya di Bogor pada tahun 2003. Dalam lokakarya tersebut dibahas tentang institusi pengelolaan TNDS. Pertama kali dalam sejarah terjadi pertemuan antara Departemen Kehutanan, Pemerintah Kapuas Hulu, wakil masyarakat dari TNDS, LSM, dan akademisi untuk mendiskusikan bagaimana bentuk, peran dan fungsi institusi atau lembaga pengelola TNDS yang diinginkan semua pihak. Secara emosional, pemerintah kabupaten Kapuas Hulu dan wakil masyarakat TNDS menyampaikan kekecewaan atas kurangnya kegiatan-kegiatan pengelolaan TNDS yang dilakukan oleh BKSDA Kalimantan Barat. Tuntutan pemerintah kabupaten dan wakil masyarakat TNDS adalah pembubaran

lembaga pengelola TNDS. Departemen Kehutanan bertahan bahwa otoritas dan mandat telah diberikan oleh negara kepada Departemen Kehutanan untuk mengelola kawasan taman nasional dan kawasan pelestarian alam lainnya. Memang belum tercapai kesepakatan, tetapi melalui lokakarya tersebut terjadi proses pembelajaran, dan penyampaian pendapat dari para pemangku kepentingan seperti yang digambarkan pada Gambar 4.

Untuk penyederhanaan, ada dua kelompok pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam pengelolaan TNDS, yaitu kelompok pemerintah dan masyarakat lokal. Kelompok pemerintah terdiri atas pemerintah pusat, yang diwakili oleh BKSDA Kalimantan Barat, dan pemerintah daerah, yaitu Propinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kelompok masyarakat terdiri atas wakil suku Melayu, dan Dayak Iban, serta lembaga-lembaga lain seperti LSM, lembaga penelitian, dan organisasi lain yang peduli terhadap TNDS. Kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi untuk mewujudkan mekanisme saling belajar ini adalah rendahnya kemauan atau motivasi para pemangku kepentingan untuk saling belajar dan saling memahami serta saling berbagi informasi, biaya dan waktu untuk menciptakan kolaborasi, serta pembangunan rasa saling membutuhkan dan saling percaya.

Para pemangku kepentingan memang tidak setara, dan memiliki minat dan kapasitas yang berbeda-beda. Umumnya kelompok masyarakat adalah pemangku kepentingan yang paling lemah kedudukannya secara politik. Semakin jauh pemangku kepentingan dari pusat kekuasaan,



Gambar 4. Proses belajar bersama antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, BKSDA Kalimantan Barat, dan Wadah/Jaringan Kerjasama Pengelolaan TNDS

maka akan semakin lemah kedudukannya. Walaupun sama-sama statusnya sebagai pemerintah, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu relatif lebih lemah dibandingkan pemerintah pusat yang memiliki wewenang untuk mengelola TNDS. Sebaliknya, pemerintah kabupaten cenderung menganggap lebih berhak secara administratif atas pembangunan sosial ekonomi regional karena kawasan TNDS berada dalam batas administrasi pemerintah kabupaten.

4.1 Upaya-upaya kolaboratif

Upaya-upaya yang paling sering dilakukan adalah proses konsultasi untuk mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat, dan pengembangan kegiatan ekonomi untuk masyarakat, seperti produksi madu hutan dan kerajinan tangan. Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan oleh Asian Wetlands Bureau (AWB, sekarang dikenal Wetlands International-Indonesia Programme) pada tahun 1992-1997. Dari tahun 1997 - 2000, kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat dilanjutkan oleh Yayasan Dian Tama, dan kemudian diteruskan oleh Yayasan Riak Bumi.

Pada tahun 2001, Yayasan Konservasi Borneo (YKB) memulai kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif kegiatan manusia terhadap TNDS. Dalam pelaksanaannya, YKB bekerja sama dengan masyarakat TNDS, Yayasan Riak Bumi (YRB), beberapa tenaga ahli dari Universitas Tanjungpura, pemerintah Kabupaten

Kapuas Hulu, dan Wetlands International - Indonesia Programme. Proses kolaborasi berjalan lambat karena para pemangku kepentingan umumnya memiliki agenda masing-masing atau kesibukan yang luar biasa sehingga cukup sulit untuk bertemu secara berkala dan rutin. Dalam banyak hal, lokasi yang jauh juga merupakan hambatan untuk melakukan pertemuan-pertemuan. Ditinjau dari kadar partisipasi, proses yang terjadi masih bersifat ko-operasi dan kemitraan karena pimpinan YKB bertanggung jawab atas hasil-hasil kegiatan. Peranan pemangku kepentingan lainnya umumnya terbatas pada pemberian masukan dan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan evaluasi dan tanggung jawab masih berada pada YKB.

Bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah diskusi-diskusi terfokus, konsultasi, lokakarya bersama masyarakat TNDS, pemerintah kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat, dan Nasional, penyebaran informasi melalui buku, poster, artikel-artikel di koran, dialog interaktif di TVRI Pontianak, dan lobi dengan para pengambil keputusan di Kabupaten Kapuas Hulu. Kegiatan partisipatif dalam skala kecil pernah dilakukan bersama masyarakat desa Kenelang untuk mencari pakan alternatif ikan toman, yang dibesarkan dalam karamba. Hasil-hasil kegiatan berupa Deklarasi Merpati, Rencana Aksi Partisipatif Pengelolaan TNDS, poster, dan buku.

Tingkat kesulitan yang terjadi berbeda-beda kadarnya. Pada tingkat masyarakat, terasa cukup sulit untuk mencapai kesadaran bersama untuk melakukan perubahan-perubahan. Bagi masyarakat, upaya-upaya konservasi, misalnya melarang penggunaan bubu warin, sulit dilakukan karena ada rasa takut akan kehilangan pendapatan tunai. Bubu warin merupakan alat tangkap yang destruktif karena akan menangkap seluruh jenis ikan-ikan berukuran kecil, bahkan sekecil batang korek api. Ikan-ikan kecil ini digunakan untuk pakan ikan toman (*Channa micropeltes*) yang dipelihara dalam karamba. Sebagian besar masyarakat mengharapkan tindakan dari pemerintah untuk secara konsisten menegakkan hukum agar tercegah pelanggaran dan menangkap para pelanggar hukum. Mereka merasa tidak memiliki kekuatan dan legalitas untuk menjatuhkan sanksi-sanksi hukum bagi anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran.

Pada tingkat lembaga non-pemerintah, kolaborasi juga belum dapat terwujud dengan sempurna. Umumnya, anggota-anggota LSM masih lemah kapasitasnya, baik secara teknis maupun finansial. Masih ada masalah-masalah sederhana, seperti pembagian peran yang belum dapat dirumuskan. Seringkali, peran LSM tidak konsisten karena harus menyesuaikan dengan program yang ditawarkan oleh donor.

Dalam membina hubungan antara LSM dengan pemerintah, masalah yang paling dirasakan adalah kurangnya pelayanan dan perhatian pemerintah terhadap LSM lokal. Barangkali, kekuatan finansial dan politik yang lemah, LSM lokal masih kurang diakui peranannya dalam membangun masyarakat. Sepertinya, pemerintah lebih menyukai besarnya gaung politik kegiatan daripada dampak kegiatan bagi keuntungan masyarakat dan pelestarian TNDS. Hal ini sangat menghambat terwujudnya kolaborasi yang setara dan implementasi kegiatan di lapangan.

Hasil-hasil kegiatan proyek ternyata menimbulkan beberapa inspirasi dan tindakan, yang dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini penyampaian informasi dapat membawa perubahan. Walaupun dampak-dampak kegiatan diamati secara kualitatif, tetapi telah menunjukkan arah yang positif. Misalnya, pencanangan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai kabupaten Konservasi (Lihat SK Bupati Kabupaten Kapuas Hulu No.144/2003). Pencanaan Kabupaten Konservasi sangat mungkin bernuansa politik, karena diikuti oleh surat permintaan kompensasi dari pemerintah pusat dan masyarakat internasional atas perlindungan hutan.

Untuk memulihkan sumberdaya perikanan, Bupati Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan beberapa danau menjadi danau tutupan, artinya

danau-danau tersebut ditutup dari kegiatan penangkap ikan. Proses penetapan danau tutupan ini biasanya diajukan oleh masyarakat, sehingga ada jaminan bahwa ikan-ikan yang akan dilepas dalam danau tutupan tersebut tidak akan ditangkap dan dibiarkan menjadi induk-induk ikan yang akan menghasilkan keturunan dan memperbanyak populasi. Hasil-hasil penutupan danau ini masih belum dapat dievaluasi karena baru terjadi pada tahun 2003 dan 2004. Dalam skala jangka panjang, seharusnya dibangun lembaga riset perikanan air tawar yang luarannya diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan air tawar.

Tindakan menguatkan keberadaan danau tutupan dengan SK Bupati merupakan upaya konservasi yang paling mungkin dilaksanakan pada saat ini. Jangankan dalam skala kawasan, upaya-upaya konservasi pada tingkat kampung cukup sulit dilakukan karena pada dasarnya masyarakat tidak homogen, tetapi berkelompok menurut kepentingan dan kepeduliannya. Karena itu harus ada keberanian pemerintah daerah (kabupaten dan propinsi) untuk mengakui keberadaan masyarakat adat di kawasan TNDS dan menerapkan secara eksklusif hak-hak masyarakat adat untuk memelihara TNDS. Untuk merencanakan perubahan yang luar biasa ini, partisipasi para pemangku kepentingan TNDS mutlak terwujud, dan mungkin diperlukan proses-proses yang sangat panjang untuk mencapai konsensus ini. Untuk bahan kajian, barangkali diperlukan proyek contoh kampung adat konservasi (*customary conservation village*) atau kecamatan konservasi sebelum menjadi kabupaten konservasi.

Pada tingkat pemerintah pusat, pembicaraan untuk membentuk Balai TNDS semakin giat dilaksanakan. Pada bulan Januari 2005, misalnya, BKSDA Kalimantan Barat telah mengundang pejabat dari Menteri Pendayaaan Aparatur Negara untuk menilai kebutuhan BKSDA Kalimantan Barat, terutama dalam rangka pembentukan Balai TNDS. Yayasan Konservasi Borneo juga diajak oleh BKSDA Kalimantan Barat untuk terlibat dalam proses diskusi pembentukan badan pengelola TNDS dan pemaparan masalah-masalah yang sedang terjadi di TNDS. Sebaliknya YKB juga mengajak staff BKSDA untuk melakukan kunjungan ke TNDS, tinggal bersama masyarakat, dan melakukan pengamatan langsung. Pihak Departemen Kehutanan kelihatannya sangat serius untuk membentuk Balai TNDS, yang kemungkinan akan melaksanakan pengelolaan TN dengan pendekatan kolaboratif (Lihat Peraturan Menteri Kehutanan P.19/2004).

Pada tingkat masyarakat, terdapat beberapa perubahan berdasarkan inisiatif sendiri. Perubahan untuk melarang penggunaan bubu warin untuk memasok pakan ikan Toman, dapat

dijumpai di dusun Genting. Sebagai gantinya, masyarakat mencoba membesarkan ikan jelawat (*Leptobarbus hoeveni*). Tindakan yang sama juga dilakukan di desa Kenelang. Pemeliharaan ikan herbivor lain seperti patin (*Pangasius spp*) dijumpai di desa Sekulat. Di desa Leboyan juga terdapat pengaturan penggunaan bubu warin, yang diperbolehkan dipasang hanya dalam jangka waktu enam bulan.

Masyarakat di dusun Genting juga satu-satunya yang tidak melakukan penebangan pada hutan adat Nung, berlawanan dengan desa-desa lainnya, seperti Kenelang, Pemerak, Sekulat, Empanang, dan Pengumbang. Argumen yang diajukan oleh masyarakat mengapa hutan adat Nung ditebang adalah penebangan dilakukan dengan sistem tebang pilih, sehingga tidak akan merusak. Pada tahun 1970-an juga pernah ada HPH yang beroperasi di kawasan hutan Nung, dan dinilai oleh masyarakat tidak menimbulkan dampak. Hasil penjualan kayu sebagian digunakan oleh masyarakat untuk membangun fasilitas umum seperti perbaikan gertak (jalan terbuat dari kayu di atas air) dan pembangunan mesjid.

Kegiatan pembuatan pakan alternatif untuk toman dilakukan berdasarkan percobaan bersama masyarakat, yaitu budidaya cacing. Pertama-tama rencana kegiatan disampaikan dalam diskusi kelompok, dan ide kegiatan tidak datang dari masyarakat tetapi ditawarkan oleh YKB. Pada awalnya masyarakat merasa tertarik untuk berpartisipasi, namun setelah dinyatakan bahwa kegiatan bersifat sukarela dan YKB hanya akan membantu secara teknik dan pemberian bantuan prasarana yang dibutuhkan, seperti bantuan pembangunan tempat budidaya cacing, serta pembuatan karamba untuk percobaan minat masyarakat berkurang. Akhirnya para pemangku kepentingan yang secara sukarela berpartisipasi adalah orang-orang tua, yang memiliki banyak waktu. Sedangkan golongan lain, yang masih muda lebih tertarik menangkap ikan dan berharap dapat bayaran atau kompensasi atas waktu yang akan dialokasikan untuk kegiatan proyek. Proses pelatihan budidaya cacing tetap dilaksanakan, dan salah satu staff YKB tinggal di kampung selama 4 bulan, dari Maret - Juni 2003. Percobaan dilakukan, dengan memberikan pakan cacing kepada 200 ikan-ikan toman dalam satu karamba, dan 200 ikan toman lainnya dipelihara dalam karamba terpisah dan diberikan umpan anak-anak ikan seperti biasanya. Ikan-ikan toman yang diberi cacing ternyata mengalami kematian. Kemungkinan pakan yang diberikan tidak cukup, sehingga terjadi saling memakan (kanibal) antara ikan-ikan itu. Dari hasil evaluasi masyarakat menyarankan untuk tidak melakukan budidaya cacing, dan mengatakan lebih baik budidaya keong atau kodok. Selanjutnya dicoba

budidaya keong, namun keong-keong tersebut mati karena kekurangan air pada musim kering. Proses pendampingan juga terhenti, karena staff YKB tersebut sakit malaria dan batas waktu proyek berakhir.

Beberapa pelajaran penting yang dapat ditarik dari percobaan pakan ini adalah:

- Belum diketahui dengan baik perilaku ikan, dan teknik-teknik budidaya ikan toman
- Minat masyarakat lebih dominan untuk mendapatkan bantuan tunai daripada bantuan teknik
- Masyarakat kekurangan waktu untuk melakukan percobaan dan memelihara ikan dengan intensif
- Ada keyakinan bahwa tingkat resiko dari percobaan terlalu besar sehingga dapat menimbulkan kerugian jika terlibat dalam kegiatan.

4.2 Faktor pendukung dan penghambat proses kolaboratif

Penyebaran informasi nampaknya merupakan alat yang terbaik untuk meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan. Informasi yang disebarkan melalui buku, diskusi informal atau omong-omong, dan lokakarya telah menimbulkan perubahan-perubahan, walaupun masih dalam skala kecil. Berdasarkan pengalaman, efektivitas pendekatan jauh lebih tinggi jika dilakukan dalam bentuk-bentuk informal. Yang paling lama adalah proses pengambilan inisiatif. Umumnya, budaya menunggu sangat terasa sehingga jika tidak diminta, sebagian besar pemangku kepentingan tidak akan bertindak. Hal ini terjadi akibat dari budaya birokrasi (harus ada petunjuk dari atasan misalnya), dan pola paternalistik yang sangat berpengaruh dalam pembentukan perilaku masyarakat.

Keunikan TNDS telah menarik perhatian para pemangku kepentingan lain, seperti para peneliti dari Fakultas Kehutanan IPB, dan mahasiswa-mahasiswa Universitas Tanjungpura. Sebelum ini, daya tarik TNDS lebih dikenal oleh para peneliti asing atau turis-turis asing yang ingin melakukan petualangan di hulu Sungai Kapuas. Dengan tersedianya informasi dalam bahasa Indonesia, para pemangku kepentingan yang berada dekat dengan TNDS semakin tertarik dan lebih peduli. Namun, informasi yang diterima belum semuanya dapat dipahami. Hal ini cukup berbahaya karena muncul kembali ide untuk membangun bendung di kawasan TNDS.

Ide membendung TNDS didasarkan asumsi bahwa kekeringan danau-danau dan sungai-sungai kecil dalam kawasan TNDS menimbulkan dampak negatif seperti berkurangnya populasi ikan, dan kesulitan transportasi. Ide ini pernah

diajukan oleh Tim Peneliti dari Fakultas Perikanan IPB sekitar tahun 1990-an, dan kemudian muncul lagi pada tahun 2002 pada waktu lokakarya di Pontianak oleh Bupati Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tahun 2004, Bappeda Propinsi Kalimantan Barat mengajukan usul untuk membendung TNDS, sebagai upaya pengendalian kekeringan di Kalimantan Barat. Menanggapi usulan ini YKB melakukan lobi, dan menulis artikel di koran (lihat Tabel 3) untuk membentuk opini publik bahwa usulan membendung TNDS sama sekali tidak layak, karena akan menghilangkan keunikan atau ciri khas TNDS sebagai kawasan danau musiman. Hasilnya untuk sementara ide membangun bendung sudah tidak menjadi wacana lagi. Kejadian ini menunjukkan bahwa pemangku kepentingan diharapkan proaktif dan menyampaikan pendapat, fakta, data, dan informasi melalui media komunikasi.

Banyak sekali kesulitan untuk membentuk kolaborasi. Peraturan Menteri Kehutanan No.P19 menentukan kolaborasi pengelolaan KSA dan KPA dilakukan melalui kesepakatan dan kesepahaman yang tertulis (Pasal 5 ayat 1). Secara praktis hal ini mungkin sulit dicapai karena terlalu banyak perbedaan antara pemangku-pemangku kepentingan (Lihat Tabel 1) dan membutuhkan tenaga, waktu, biaya serta inisiatif. Dalam praktek, masih perlu adanya koordinator karena proses-proses kolaboratif belum mencapai titik kesempurnaan dan masih diperlukan tenaga penggerak dan pendobrak. Seharusnya, Departemen Kehutanan yang bergerak mengimplementasikan PerMenHut No P19/2004 tersebut.

Berdasarkan pengalaman, proses kolaboratif lebih mudah dilakukan berdasarkan pendekatan sukarela untuk merubah nasib, dan menciptakan harapan akan masa depan yang dicita-citakan. Faktor-faktor kesulitan atau pengalaman traumatis seperti kepunahan sumberdaya alam dan bencana alam kadang kala dapat menjadi faktor pemicu untuk menimbulkan motivasi diri (self motivation) secara kolektif, dan kemudian melakukan aksi-aksi untuk menanggapi

kelangkaan sumberdaya alam dan menciptakan pandangan atau pendekatan-pendekatan baru. Proses-proses ini akan lebih cepat terjadi jika dibantu dengan pemberian layanan dan bimbingan teknis.

Beberapa faktor bersifat penghambat. Umumnya para pemangku kepentingan (pihak pemerintah) lebih mendahulukan struktur yang melekat pada otoritas daripada pelaksanaan fungsi dan peran, atau pemangku kepentingan (pihak pemerintah dan LSM) melupakan atau kurang menghargai peranan pemangku kepentingan lain. Hal ini mungkin terjadi karena adanya kompetisi antara lembaga-lembaga. Pada umumnya budaya kompetisi belum terarah untuk menjadi yang terbaik, tetapi dibuat mekanisme menghapuskan peran pemangku kepentingan yang dipandang dapat mengancam, mengambil alih, atau menjatuhkan peranan pemangku kepentingan yang merasa memiliki hak atau kepedulian yang lebih besar daripada para pemangku kepentingan lainnya. Budaya ini dapat dipandang sebagai cermin dari perilaku eksploitatif, dimana pemangku-pemangku kepentingan berlomba untuk menjadi dominan, dan bukan menjadi pelayan yang berkualitas terbaik. Hal ini kemungkinan dapat diatasi jika dapat dirumuskan secara bersama-sama tentang masalah-masalah yang dibutuhkan masyarakat untuk diatasi. Yang perlu dipahami bukan hanya isu, tetapi perlu pemahaman yang berlandaskan pengetahuan, data dan fakta yang dapat diuraikan menurut akal sehat. Penentuan skala prioritas masalah, yang bersumber pada sikap rasionalitas, untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat diperkirakan dapat menjadi jembatan untuk membangun kolaborasi para pemangku kepentingan.

Para pemangku kepentingan jarang melakukan komunikasi karena sibuk dengan agenda-agenda lain. Proses komunikasi masih terbatas satu arah, karena belum terbangun rasa kepercayaan bahwa ide atau informasi yang disampaikan tidak akan diklaim sebagai hasil pekerjaan sendiri. Pemangku kepentingan

Tabel 3. Upaya peningkatan kesadaran publik melalui tulisan di koran

Juduk Artikel	Tanggal Terbit	Nama koran
Dampak membangun dengan cara merusak	2 Februari 2002	Kapuas Post
Mengapa lahan dan hutan terbakar dan dibakar?	21 Juli 2003	Kompas
Proses pembentukan hutan rawa gambut	21 Juli 2003	Kompas
Dibalik pembalakan liar	17 Maret 2004	Pontianak Post
Ulang Tahun Asap dan Kekeringan Danau Sentarum	5 Juli 2004	Pontianak Post
Penyelundupan Kayu	4 Agustus 2004	Pontianak Post
Menuju Kehancuran Taman Nasional Danau Sentarum	31 Agustus 2004	Pontianak Post
Fenomena Kekeringan Taman Nasional Danau Sentarum	31 Agustus 2004	Kompas
Penebangan liar dan tata kelola sumberdaya hutan	26 Juli 2005	Pontianak Post

enggan menjadi fasilitator karena peran dan tanggung jawab belum jelas, wewenang belum terbagi, banyaknya pemangku kepentingan ingin melaksanakan berbagai jenis proyek, dan buruknya prasarana untuk investasi. Fasilitator seringkali menjadi koordinator, yang dirasakan menjadi beban, sementara imbalan yang akan diperoleh tidak cukup besar. Kolaborasi juga membutuhkan negosiasi yang lama, dan memakan tenaga dan biaya yang cukup besar.

Bentuk-bentuk kolaboratif dapat dimulai dalam skala kecil dan melibatkan beberapa pemangku kepentingan (antara 2 sampai 3).

Kolaborasi di kalangan suku Melayu sebaiknya berbeda dengan suku Dayak. Kolaborasi dengan suku Melayu dapat dilaksanakan dalam kegiatan pengembangan budidaya ikan herbivor, misalnya. Sedangkan pada suku Dayak kemungkinan dapat dibentuk kolaborasi dalam mengembangkan perladangan yang berkelanjutan. Perlu diingat, bahwa baik suku Melayu maupun Dayak tidak bersifat homogen tetapi terdiri atas kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Perbedaan ini tercermin dari variasi peraturan adat yang dirumuskan oleh masing-masing kampung.

5. Kesimpulan

Pengelolaan kolaboratif adalah sebuah harapan yang dapat menyelamatkan Taman Nasional Danau Sentarum. Pendekatan ini semakin relevan untuk dilaksanakan karena tingginya motivasi masyarakat untuk melakukan kerjasama dan keputusan politik dari Kabupaten Kapuas Hulu untuk menjadi kabupaten konservasi.

Berdasarkan pengalaman di lapangan, kolaborasi sebaiknya dilakukan berdasarkan ikatan antara para pemangku kepentingan untuk memecahkan masalah-masalah yang telah dirumuskan bersama. Adanya tujuan yang jelas dan mudah dicapai dapat dipandang sebagai tali pengikat untuk secara bersama-sama melakukan kegiatan. Bentuk-bentuk ikatan formal sebaiknya dilakukan jika kolaborasi melibatkan lembaga-lembaga. Umumnya pimpinan lembaga membutuhkan formalitas agar prosedur birokrasi dan administrasi tidak dilanggar.

Kondisi Taman Nasional Danau Sentarum sangat kompleks karena merupakan kawasan transisi antara ekosistem akuatik dan daratan. Model-model kolaboratif untuk menangani permasalahan akuatik akan berbeda dengan model-model kolaboratif untuk menangani permasalahan yang dijumpai pada ekosistem daratan. Teknik berkolaborasi dengan suku Dayak juga akan berbeda dengan teknik berkolaborasi dengan suku Melayu. Untuk mengurangi biaya transaksi dan komunikasi yang terlalu mahal, kolaborasi dapat dilaksanakan oleh 2 sampai 3 pemangku kepentingan. Untuk memelihara

hubungan antara pemangku kepentingan, pertemuan berkala penting dilakukan.

Pada tingkat lembaga, antara pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Departemen Kehutanan, sangat perlu dirumuskan mekanisme yang saling menguntungkan, terutama tentang otoritas pengelolaan Taman Nasional Danau Sentarum. Secara hukum, otoritas (dalam hal ini diartikan sebagai wujud dari kekuasaan) pengelolaan TNDS berada pada Departemen Kehutanan, dan status ini sulit diganggu gugat. Yang mungkin dilakukan adalah pembagian wewenang dan tanggung jawab berdasarkan fungsi-fungsinya. Jika kekuasaan tidak dapat dibagi, Departemen Kehutanan dapat mendelegasikan sebagian wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan Taman Nasional Danau Sentarum. Hal ini masih perlu dibahas lebih rinci dan diteliti lebih lanjut.

Sebagai langkah konkret, dan untuk mewujudkan tercapainya cita-cita kabupaten konservasi, perlu dibuat percontohan desa atau kecamatan konservasi. Dalam model ini sangat perlu ditekankan proses-proses belajar yang mengubah perilaku eksploitatif dan konsumtif menjadi produktif dan konservatif. Perubahan ini tidak akan menjadi gerakan sosial jika para tokoh-tokoh desa/kecamatan dan para pengambil keputusan tidak dapat memberikan contoh-contoh pola dan gaya hidup yang selaras dengan kaidah-kaidah konservasi.

6. Daftar Pustaka

- Aglionby, Julia. 1997. Danau Sentarum Wildlife Reserve, Indonesia: A Case Study for Measuring The Incremental Costs of Biodiversity Conservation. in *Wetlands, Biodiversity and Development. Proc. Workshop 3 of Int. Conf. on Wetlands and Development, Kuala Lumpur, 9-13 October 1995.* Ed. By Giesen, W. Wetlands International, Kuala Lumpur.
- Anshari, G. Kershaw AP., van der Kaars, S. 1999. Evidence of climate change in lowland, Pemerak peatland forest within the Danau Sentarum Wildlife Reserve, West Kalimantan over the last 28000 Yr BP. Proceedings second international conference on science and technology for the assessment of global climate change and its implication on Indonesian Maritime Continent. Jakarta 29 Nov- 1 Dec 1999. Agency for the Assessment and Application of Technology. Weather modification technical service unit-BPPT: B2.1-B2.13.
- Anshari, G., Kershaw, AP., van der Kaars, S. 2001. A Late Pleistocene and Holocene pollen and charcoal record from peat swamp forest, Lake Sentarum Wildlife Reserve, West Kalimantan, Indonesia. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* 171: 213-228.
- Anshari, G. 2004. Managing anthropogenic impacts on Danau Sentarum National Park. This paper is presented in the UNEP-IETC 10th Anniversary International Symposium on Integrated Water Resource Management. Lakes as the Initial Point at Lake Biwa Museum, Kusastu City , Japan on June 6th - 7th, 2004.
- Anshari, G., Kershaw, A.P., van der Kaars, S., and Jacobsen, G. 2004. Environmental change and peatland forest dynamics in the Lake Sentarum area, West Kalimantan, Indonesia. *JQS* 19(7): 637-656
- Anshari, Gusti., A, Armiyarsih. 2005. Carbon decline and its implications on livelihood security of local communities. In *Carbon Forestry: Who will benefit? Proceedings of workshop on carbon sequestration and sustainable livelihoods.* Daniel Murdiyarso and Hety Herawati (Editors). CIFOR. Bogor
- Borrini-Feyerabend, G., Farvar, M.T., Nguingui, J.C., Ndangang, V. 2000. Co-management of natural resources: Organizing negotiation and learning by doing Kasperek, Heidelberg (germany). <http://nrm.massey.ac.nz/changelink/cmnr.html>
- Carlsson, Lars. Berkes, Fikret. 2005. Co-management: concepts and methodological implications. *Jour Env. Man* 75: 65-76
- Colfer, Carol., Salim, Agus., Wadley, Reed., Dudley, Richard G. 2000. Understanding patterns of resource use and consumption: a prelude to co-management. *Borneo Research Bulletin* 31: 29-88
- Giesen, W. 1987. Danau Sentarum Wildlife Reserve. Inventory, Ecology and Management Guidelines. A World Wildlife Fund Report for The Directorate of Forests Protection and Nature Conservation (PHPA), Bogor.
- Giesen, Wim., Aglionby, Julia. 2000. Introduction to Danau Sentarum National Park West Kalimantan, Indonesia. *Borneo Research Bulletin* 31: 5-28
- Ingles, Andrew W., Musch, Arne, Hoffmann, Heve Q Wist. 1999. The participatory process for supporting collaborative management of natural resources: An overview. FAO. Rome.
- Molengraaff, G.A.F., 1900. *Geologische Verkenningstochten In Central Borneo, 1893-94.* Brill, Leiden.
- Verstappen, H.Th. 1975. On palaeo climates and landform development in Malesia. In *Modern Quaternary Research in South East Asia.* Edited by Batrtra, G-J., and Casparie, W.A.A.A. Balkema, Rotterdam, pp. 3-36
- Verstappen, H.Th. 1980. Quaternary climatic changes and natural environment in SE Asia. *Geojournal* 4.1:45-54
- Verstappen, H.Th. 1994. Climatic change and geomorphology in South and South-East Asia. *Geo-Eco-Trop* 16 (1-4): 101-147

Forests and Governance Programme Series

1. a. A Rough Guide to Developing Laws for Regional Forest Management. 2004
Jason M. Patlis
b. Pedoman Umum Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Hutan. 2004
Jason M. Patlis
2. Desentralisasi ancaman dan harapan bagi masyarakat adat. 2004
Hendra Gunawan
3. Brief on the Planned United Fiber System (UFS) Pulp Mill Project for South Kalimantan, Indonesia. 2004
Emile Jurgens, Christopher Barr, Christian Cossalter
4. Kepentingan Nasional atau Lokal? Konflik Penguasaan Lahan di Hutan Penelitian Sebulu di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur
Catur Budi Wiati
5. Kebijakan Pemerintah Pusat di Bidang Konservasi dari Perspektif Daerah dan Masyarakat Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur: Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur
Eddy Mangopo Angi
6. Integrasi hak pemanfaatan tanah masyarakat Dayak dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten. Studi di Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah.
Mayang Meilantina

Publikasi CIFOR terkait

District and Provincial Case Studies

Case Study 1. McCarthy, J.F. 2001. Decentralisation, local communities and forest management in Barito Selatan District, Central Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 2. McCarthy, J.F. 2001. Decentralisation and forest management in Kapuas District, Central Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 3. Barr, C., Wollenberg, E., Limberg, G., Anau, N., Iwan, R., Sudana, I.M., Moeliono, M., and Djogo, T. 2001. The impacts of decentralisation on forests and forest-dependent communities in Malinau District, East Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 4. Casson, A. 2001. Decentralisation of policies affecting forests and estate crops in Kutai Barat District, East Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 5. Casson, A. 2001. Decentralisation of policymaking and administration of policies affecting forests and estate crops in Kotawaringin Timur District. Central Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Studies 6 and 7. Potter, L. and Badcock, S. 2001. The effects of Indonesia's decentralisation on forests and estate crops in Riau Province: Case studies of the original districts of Kampar and Indragiri Hulu. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 8. Soetarto, E., Sitorus, MTF and Napiri, MY. 2001. Decentralisation of administration, policy making and forest management in Ketapang District, West Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 9. Obidzinski, K. and Barr, C. 2003. The effects of decentralisation on forests and forest Industries in Berau District, East Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 10. Yasmi, Y., Anshari, G.Z., Alqadrie S., Budiarto, T., Ngusmanto, Abidin, E., Komarudin, H., McGrath, S., Zulkifli and Afifudin. 2005. The Complexities of Managing Forest Resources in Post-decentralization Indonesia: A Case Study from Sintang District, West Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 10b. Yasmi, Y., Anshari, G.Z., Alqadrie S., Budiarto, T., Ngusmanto, Abidin, E., Komarudin, H., McGrath, S., Zulkifli and Afifudin. 2005. Kompleksitas Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 11. Ngakan, P.O., Achmad, A., Wiliam, D., Lahae, K. and Tako, A., 2005. The Dynamics of Decentralization in the Forestry Sector in South Sulawesi: The History, Realities and Challenges of Decentralized Governance. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 11b. Ngakan, P.O., Achmad, A., Wiliam, D., Lahae, K. and Tako, A., 2005. Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan: Sejarah, Realitas dan Tantangan Menuju Pemerintahan Otonomi Yang Mandiri. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 12. Samsu, Suramenggala, I., Komarudin, H., Ngau, Y., 2005. The Impacts of Forestry Decentralization on District Finances, Local Community and Spatial planning: A Case Study in Bulungan District, East Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 12b. Samsu, Suramenggala, I., Komarudin, H., Ngau, Y., 2005. Dampak Desentralisasi Kehutanan terhadap Keuangan Daerah, Masyarakat Setempat dan Penataan Ruang: Studi Kasus di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 13. Tokede, M.J., Wiliam, D., Widodo, Gandhi, G., Imburi, C., Patriahadi, Marwa, J. and Yufuai, M.C., 2005. The Impacts of Special Autonomy in Papua's Forestry Sector: Empowering Customary Communities (*Masyarakat Adat*) in Decentralized Forestry Development in Manokwari District. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 13b. Tokede, M.J., Wiliam, D., Widodo, Gandhi, G., Imburi, C., Patriahadi, Marwa, J. and Yufuai, M.C., 2005. Dampak Otonomi Khusus di Sektor Kehutanan Papua: Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dalam Pengusahaan Hutan di Kabupaten Manokwari. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 14. Sudirman, William, D. and Herlina, H., 2005. Local Policy-making Mechanisms: Processes, Implementation and Impacts of the Decentralized Forest Management System in Tanjung Jabung Barat District, Jambi. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 14b. Sudirman, William, D. and Herlina, H., 2005. Mekanisme Pengambilan Kebijakan Daerah di Bidang Kehutanan: Proses, Implementasi dan Dampak Desentralisasi pada Sektor Kehutanan di Tanjung Jabung Barat, Jambi. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

CIFOR Governance Brief

Governance Brief No. 1. Wulan, Y.C.; Yasmi, Y.; Purba, C.; Wollenberg, E. 2004. An analysis of forestry sector conflict in Indonesia 1997 - 2003. Bogor, Indonesia, CIFOR. 8p.

Governance Brief No. 2. Cahyat, A. 2004. Bagaimana kemiskinan diukur?: beberapa model pengukuran kemiskinan di Indonesia. Bogor, Indonesia, CIFOR. 8p.

Governance Brief No. 3. Cahyat, A. 2004. Sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten: pembahasan peraturan perundangan di bidang pengawasan. Bogor, Indonesia, CIFOR. 8p.

Governance Brief No. 4. Wollenberg, E.; Belcher, B.; Sheil, D.; Dewi, S.; Moeliono, M. 2004. Why are forest areas relevant to reducing poverty in Indonesia?. Bogor, Indonesia, CIFOR. 6p.

Governance Brief No. 4i. Wollenberg, E.; Belcher, B.; Sheil, D.; Dewi, S.; Moeliono, M. 2004. Mengapa kawasan hutan penting bagi penanggulangan kemiskinan di Indonesia?. Bogor, Indonesia, CIFOR. 6p.

Governance Brief No. 5. Lestiawati, Y. 2005. Kehutanan daerah di era desentralisasi penghambat koordinasi? 4p.

- Governance Brief No. 6.** Sumarlan. 2005. Kupu-kupu sayap burung musnah, masyarakat pegunungan Arfak menderita. 2p.
- Governance Brief No. 7.** Sukardi. 2005. Mencari benang merah kelangsungan hutan adat ongkoe di Kabupaten Barru. 2p.
- Governance Brief No. 8.** Gunawan, H. 2005. Implementasi desentralisasi salah masyarakat adat menuai masalah. 4p.
- Governance Brief No.9.** Yulianti, A. 2005. Kopermas: Masyarakat Hukum Adat sebagai Tameng bagi Pihak yang Berkepentingan. 4p.
- Governance Brief No. 10.** Yusran. 2005. Mengembalikan kejayaan hutan kemiri rakyat. Bogor, Indonesia, CIFOR. 4p.
- Governance Brief No. 11.** Angi, E.M. 2005. Bagaimana kebijakan dapat dikoordinasikan antara pusat, daerah dan masyarakat?. Bogor, Indonesia, CIFOR. 4p.
- Governance Brief No. 12.** Affandi, O. 2005. Dampak Kebijakan IPPK dan IUPHHK Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Malinau. Bogor, Indonesia, CIFOR. 6p.
- Governance Brief No. 13.** Wiati, C.B. 2005. Apakah Setelah Desentralisasi Hutan Penelitian Lebih Bermanfaat Untuk Masyarakat Lokal?. Bogor, Indonesia, CIFOR. 4p.
- Governance Brief No. 14.** Rositah, E. 2005. Kemiskinan Masyarakat Desa Sekitar Hutan dan Penanggulangannya Studi Kasus Di Kabupaten Malinau). Bogor, Indonesia, CIFOR. 8p.
- Governance Brief No. 15.** Limberg, G. 2005. Opportunities and Constraints to Community Forestry: Experience from Malinau. Bogor, Indonesia, CIFOR. 6p.
- Governance Brief 15b.** Limberg,G.; Iwan R.; Wollenberg, E.; Moeliono. M. 2005. Peluang dan Tantangan untuk Mengembangkan Hutan Kemasyarakatan. Pengalaman dari Malinau. Bogor, Indonesia, CIFOR. 6p.
- Governance Brief No. 16.** Limberg, G. 2005. How can communities be included in district land use planning? Experience from Malinau District, East Kalimantan. Bogor, Indonesia, CIFOR. 6p.
- Governance Brief No. 16b.**Limberg, G. Iwan, R. Wollenberg, E & Moeliono, M. 2006. Bagaimana masyarakat dapat dilibatkan dalam perencanaan tata ruang kabupaten? Pengalaman dari Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur
- Governance Brief No. 22.** Cahyat, A. 2005. Perubahan Perundangan Desentralisasi. Bogor, Indonesia, CIFOR. 6p.
- Governance Brief No. 23.** Cahyat, A., Wibowo, S. 2005. Masyarakat Mengawasi Pembangunan Daerah: Bagaimana agar dapat efektif?. Bogor, Indonesia, CIFOR. 6p.
- Governance Brief No. 24.** Cahyat, A. 2005. Perubahan Perundangan-undangan Keuangan Daerah Tahun 2004: Bagaimana Pengaruhnya Pada Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah? Bogor, Indonesia, CIFOR. 8p.
- Governance Brief No. 25.** Cahyat, A., Moeliono,M. 2005. Pengarusutamaan Kemiskinan: Apa, Mengapa dan Bagaimana? Bogor, Indonesia, CIFOR. 6p.
- Governance Brief 27.** Agusnawati 2006. Peran kaum perempuan dalam pengambilan keputusan Pada masyarakat pengelola hutan kemiri di Mario Pulana Bogor, Indonesia, CIFOR. 4p.
- Governance Brief 30.** Andrianto, A.;Wollenberg E; Cahyat A.; Goenner C.; Moeliono, M.; Limberg G.; Iwan R. 2006 District Governments and Poverty Alleviation in Forest Areas in Indonesia. Bogor, Indonesia, CIFOR. 6p.
- Governance Brief 31.** Muntasyarah, A.S. 2006 Agroforest karet di Jambi: dapatkah bertahan di era desentralisasi? Bogor, Indonesia, CIFOR. 4p.
- Governance Brief 32.** Sudirman. 2006. Melegalkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan. Bogor, Indonesia, CIFOR. 4p.

Publikasi lainnya

Anau, N., Iwan, R., van Heist, M., Limberg, G., Sudana, M. and Wollenberg, E. 2002. Negotiating More than Boundaries: Conflict, Power and Agreement Building in the Demarcation of Village Borders in Malinau, 131-156. *In*: Technical Report Phase I 1997-2001. ITTO Project PD 12/97 Rev.1 (F) Forest, Science and Sustainability: The Bulungan Model Forest. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Casson, A. and Obidzinski, K. 2002. From New Order to Regional Autonomy: Shifting Dynamics of Illegal Logging in Kalimantan, Indonesia. *World Development* 30(12):2133-51.

Palmer, Charles. 2004. The role of collective action in determining the benefits from IPPK logging concessions: A case study from Sekatak, East Kalimantan. CIFOR Working Paper No. 28. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Resosudarmo, I.A.P. 2003. Shifting Power to the Periphery: The Impact of Decentralisation on Forests and Forest People. *In*: Aspinall, E. and Fealy, G. (eds.) *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation*, 230-244. Singapore, Institute of Southeast Asian Studies.

Oka, N.P. and William, D. 2004. The Policy Dilemma for Balancing Reforestation Funds. Decentralisation Brief. No. 1. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Colfer, C.J.P. and Resosudarmo, I.A.P. (eds). 2002. *Which Way Forward: People, Forests and Policymaking in Indonesia*. Washington, Resources for the Future.

Center for International Forestry Research (CIFOR) adalah lembaga penelitian kehutanan internasional terdepan, yang didirikan pada tahun 1993 sebagai tanggapan atas keprihatinan dunia akan konsekuensi sosial, lingkungan dan ekonomi yang disebabkan oleh kerusakan dan kehilangan hutan. Penelitian CIFOR ditujukan untuk menghasilkan kebijakan dan teknologi untuk pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang yang bergantung kepada hutan tropis untuk kehidupannya. CIFOR adalah salah satu di antara 15 pusat Future Harvest di bawah Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR). Berpusat di Bogor, Indonesia, CIFOR mempunyai kantor regional di Brazil, Burkina Faso, Kamerun dan Zimbabwe, dan bekerja di lebih dari 30 negara di seluruh dunia.

Donatur

CIFOR menerima pendanaan dari pemerintah, organisasi pembangunan internasional, yayasan swasta dan organisasi regional. Pada tahun 2005, CIFOR menerima bantuan keuangan dari Australia, Asian Development Bank (ADB), Belgia, Brazil, Canada, China, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), Cordaid, Conservation International Foundation (CIF), European Commission, Finland, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Ford Foundation, France, German Agency for Technical Cooperation (GTZ), German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), Indonesia, International Development Research Centre (IDRC), International Fund for Agricultural Development (IFAD), International Tropical Timber Organization (ITTO), Israel, Italy, The World Conservation Union (IUCN), Japan, Korea, Netherlands, Norway, Netherlands Development Organization, Overseas Development Institute (ODI), Peruvian Secretariat for International Cooperation (RSCI), Philippines, Spain, Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Switzerland, Swiss Agency for the Environment, Forests and Landscape, The Overbrook Foundation, The Nature Conservancy (TNC), Tropical Forest Foundation, Tropenbos International, United States, United Kingdom, United Nations Environment Programme (UNEP), World Bank, World Resources Institute (WRI) dan World Wide Fund for Nature (WWF).



Program Forests and Governance di CIFOR mengkaji cara pengambilan dan pelaksanaan keputusan berkenaan dengan hutan dan masyarakat yang hidupnya bergantung dari hutan. Tujuannya adalah meningkatkan peran serta dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang kurang berdaya, meningkatkan tanggung jawab dan transparansi pembuat keputusan dan kelompok yang lebih berdaya dan mendukung proses-proses yang demokratis dan inklusif yang meningkatkan keterwakilan dan pengambilan keputusan yang adil di antara semua pihak.